

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

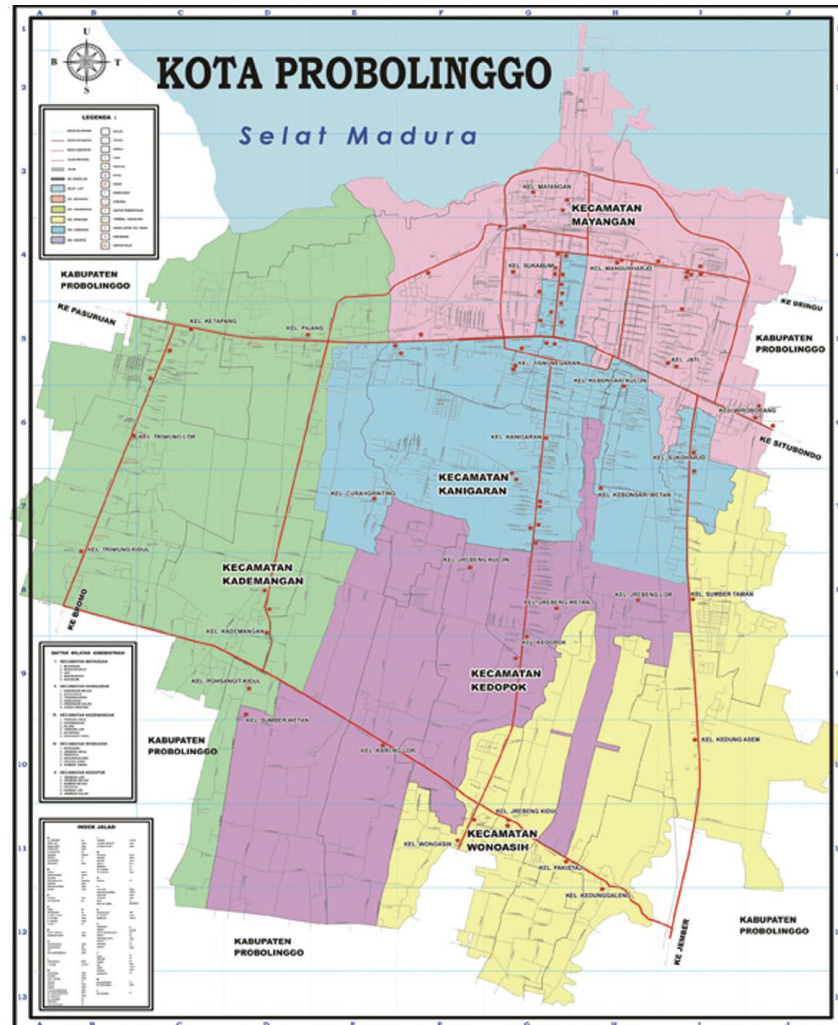
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Probolinggo

a. Keadaan Wilayah

Kota Probolinggo adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur diantara 38 Kabupaten/Kota lainnya. Letak Kota Probolinggo berada pada 7043'41''-7049'04'' Lintang Selatan dan 113010'-113015' Bujur Timur dengan rata-rata ketinggian 10 meter diatas permukaan laut. Batas wilayah Kota Probolinggo, disebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Dringu wilayah Kabupaten Probolinggo. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Leces, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Bantaran dan Kecamatan Sumberasih, yang ketiga-tiganya masuk wilayah Kabupaten Probolinggo, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sumberasih wilayah Kabupaten Probolinggo.

Luas wilayah Kota Probolinggo 56,667 Km², terbagi menjadi 5 Kecamatan dan 29 Kelurahan.



b. Topografi

Wilayah Kota Probolinggo terletak pada ketinggian 0 sampai kurang dari 50 meter di atas permukaan air laut. Apabila ketinggian tersebut dikelompokkan atas; ketinggian 0-10 meter, ketinggian 10-25 meter, ketinggian 25-50 meter. Semakin ke wilayah selatan, ketinggian dari permukaan laut semakin besar. Namun demikian seluruh wilayah Kota

Probolinggo relatif berlereng (0-2%). Hal ini mengakibatkan masalah erosi tanah dan genangan cenderung terjadi di daerah ini.

c. Geologi

Wilayah Kota Probolinggo dibentuk dari bahan induk batuan vulkanik dan zaman quarter muda (*young quaternary volcanic product*) dan bahan endapan (*alluvium*). Bahan induk tersebut terbentuk dengan fisiografi yang relative dasar. Bahan induk alluvium terdapat pada wilayah bagian utara dan tenggara, sedangkan bahan induk *volcanic product* terdapat pada bagian lainnya.

d. Jenis tanah

Jenis tanah penting diketahui terutama dalam usaha pengembangan pertanian. Jenis tanah di wilayah Kota Probolinggo terdiri dari Alluvial, Mediteran, dan Regosol. Jenis tanah alluvial regosol terdapat pada daerah paling utara yaitu daerah pantai. Alluvial kelabu tua pada bagian tengah ke utara. Jenis tanah yang terluas di wilayah Kota Probolinggo adalah alluvial coklat keabuan, yaitu dari bagian tengah hingga selatan kota. Jenis tanah regosol coklat terdapat sebagian kecil di bagian timur kota, sedangkan kompleks grumosol hitam dan litosol pada bagian barat daya kota. Jenis tanah alluvial (63,98%) merupakan tanah yang sangat baik untuk usaha pertanian, karena tersedia cukup mineral yang diperlukan untuk tumbuh-tumbuhan. Demikian pula jika digunakan untuk bangunan, jenis tanah ini

mempunyai daya tahan yang kuat karena merupakan endapan tanah liat yang bercampur pasir halus. Jenis tanah grumosol (4,82%) sifat tanahnya mudah longsor dan memiliki drainase buruk. Dengan demikian, tentunya jenis tanah ini kurang baik guna didirikan bangunan karena selalu terancam bahaya. Jenis tanah Mediteran (31,20%) merupakan jenis tanah yang memiliki karakteristik tahan menahan.

e. Iklim

Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim 2 jenis setiap tahunnya yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal, musim penghujan terjadi pada Bulan Desember sampai Bulan Mei, sedangkan musim kemarau terjadi pada Bulan Juni sampai Bulan Nopember. Data dari DPU Bidang Pengairan, untuk periode bulan Juni-Nopember praktis tidak ada hujan di Kota Probolinggo. Curah hujan per hari yang lebat terjadi pada Bulan Januari sebesar 27,09 mm/hari selama 21 hari, sedangkan lamanya hari hujan terjadi pada Bulan Januari dan Februari dengan 21 dan 15 hari hujan. Keadaan ini merupakan hasil pantauan dari 4 stasiun pengamatan hujan yang ada di Kota Probolinggo. Musim kering yang terjadi pada Bulan Juni sampai dengan Nopember di Kota Probolinggo berpengaruh terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang (kecepatan mencapai 81 km/jam) dari arah Tenggara ke Barat Laut, angin ini biasanya disebut dengan Angin Gending.

f. Wilayah Administrasi

Secara administrasi, wilayah Pemerintahan Kota Probolinggo terbagi kedalam 5 (lima) kecamatan dan 29 (dua puluh Sembilan) kelurahan yang terdiri dari :

- 1) Kecamatan Mayangan terdiri dari 5 (lima) kelurahan yaitu :
 - a) Kelurahan Mayangan;
 - b) Kelurahan Wiroborang;
 - c) Kelurahan Sukabumi dan;
 - d) Kelurahan Mangunharjo.
- 2) Kecamatan Kanigaran terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu :
 - a) Kelurahan Kebonsari Wetan;
 - b) Kelurahan Sukoharjo;
 - c) Kelurahan Tisnonegaran;
 - d) Kelurahan Kanigaran;
 - e) Kelurahan Kebonsari Kulon dan;
 - f) Kelurahan Curahgrinting.
- 3) Kecamatan Wonoasih terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu :
 - a) Kelurahan Wonoasih;
 - b) Kelurahan Jrebeng Kidul;
 - c) Kelurahan Pakistaji;
 - d) Kelurahan Kedunggaleng;
 - e) Kelurahan Kedungasem dan;

f) Kelurahan Sumbertaman.

4) Kecamatan Kademangan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu :

a) Kelurahan Triwung Kidul;

b) Kelurahan Kademangan;

c) Kelurahan Pohsangit Kidul;

d) Kelurahan Pilang;

e) Kelurahan Triwung Lor dan;

f) Kelurahan Ketapang.

5) Kecamatan Kedupok terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu :

a) Kelurahan Jrebeng Lor;

b) Kelurahan Jrebeng Wetan;

c) Kelurahan Kedupok;

d) Kelurahan Sumberwetan;

e) Kelurahan Kareng Lor dan;

f) Kelurahan Jrebeng Kulon.

g. Pendidikan Kota Probolinggo

Pendidikan Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah masih menemukan kendala di Kota Probolinggo. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tercatat persentase penduduk usia 7-24 tahun menurut partisipasi sekolah sebesar 100 persen untuk kelompok umur 7-12 tahun dan 94,73 persen untuk kelompok umur 13-15 tahun. Artinya tidak seluruh anak usia 7-15

tahun mengenyam pendidikan dasar 9 tahun. Sementara itu partisipasi sekolah untuk kelompok umur 16-18 tahun sebesar 88,44 persen, dan 35,61 persen untuk kelompok umur 19-24 tahun. Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pada tahun 2019, Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama Kota Probolinggo mencatat pada jenjang SD/MI ada 121 sekolah, 24.776 murid, dan 1.483 guru. SLTP/MTS ada 46 sekolah, 13.487 murid dan 1.039 guru. SLTA/MA Sederajat ada 45 sekolah, 13.350 murid dan 936 guru. Sedangkan untuk perguruan tinggi ada 3 perguruan tinggi, dengan 379 murid dan 75 dosen. (BPS Kota Probolinggo, 2019)

B. PENYAJIAN DATA FOKUS PENELITIAN

Efektivitas Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo

Sebuah organisasi dapat dikatakan organisasi yang sudah efektif apabila dalam pengelolaan sudah dilakukan secara sistematis yaitu mulai dari adanya perencanaan sampai dengan adanya evaluasi suatu kegiatan. Dalam pengelolaan Dana BOS harus adanya perencanaan dan adanya pengawasan, agar nantinya program Dana BOS di sekolah dapat membantu untuk meningkatkan mutu

pendidikan yang ada di sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo ialah melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Pengelolaan Dana BOS yang dilaksanakan oleh pengelola sekolah SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo yaitu merujuk pada kesepakatan bersama anggota sekolah yang melibatkan kepala sekolah, bendahara sekolah, dewan guru dan komite sekolah. Efektivitas Dana BOS dilakukan oleh segenap guru yang memiliki kewenangan dan telah diberikan kepercayaan untuk menjadikan sekolah lebih bermutu. (Depiani, 2015) Tentunya disini guruhanyalah sebagai pelaksana program. Guru sebagai figur yang membantu melancarkan pelaksanaan proses belajar mengajar melalui anggaran yang diberikan dari Dana BOS.

Kepala sekolah SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo sebagai pengawas pengelolaan program Dana BOS untuk melaksanakan aktivitas sekolah dapat merujuk kepada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada raudlatul athfal dan bantuan operasional tahun anggaran 2020. Sejalan dengan keputusan tersebut dengan begitu tingkat efektivitas juga bisa dilihat melalui Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS.

Anggaran dana BOS SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo pada tahun 2020 yaitu Rp.900.000/siswa. Sedangkan jumlah siswa berdasarkan data yang diterima oleh peneliti ialah sebanyak 460 siswa. Anggaran yang digunakan ialah untuk

memenuhi kebutuhan yang tertulis pada pedoman penggunaan Dana BOS yang telah dialokasikan pada 10 sub bidang. Data tersebut dapat dilihat pada bab 2 kajian teori pada tabel komponen-komponen pembiayaan Dana BOS. Pada data tersebut menjelaskan dana-dana yang dialokasikan untuk pembelian buku sebagai perlengkapan siswa untuk belajar. Hal itu berarti sangat memungkinkan perlengkapan buku di sekolah tercukupi melalui anggaran Dana BOS.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 7 yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban masyarakat (orang tua siswa) kepada anaknya untuk dapat memberikan pendidikan dasar. Undang-undang tersebut dengan tegas menjelaskan bahwasanya setiap anak yang berusia tujuh tahun sampai lima belas tahun wajib mendapatkan pendidikan. Undang-undang tersebut dapat dijadikan tonggak utama bagi untuk menjadikan sekolah berkualitas. Hal tersebut juga tertuang oleh salah satu misi SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo yaitu “Mengupayakan Penyetaraan Kualitas Sekolah”

Menurut analisa peneliti bahwasanya letak efektivitas Dana BOS bukan hanya terletak bagaimana tim BOS dapat mengatur keuangan pembiayaan penggunaan Dana BOS, tetapi makna Dana BOS itu juga terkait bagaimana pihak sekolah dapat memajukan kualitas pendidikan siswa siswa di SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo.

4.2.1 Mekanisme Pengelolaan Dana BOS di SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang dialokasikan oleh pusat berdasarkan jumlah siswa yang ada pada tiap tiap sekolah. Dana BOS yang disalurkan saat ini sudah disampaikan melalui anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) Kabupaten/kota. Pengalokasian Dana BOS hanya dilakukan dalam 1 tahun ajaran, yaitu terhitung dari Januari-desember.

Jika dilihat dari pengelolaan Dana BOS antara Sekolah negeri dengan Sekolah swasta juga terdapat perbedaan pengelolaan Dana BOS antara Sekolah swasta dengan Sekolah negeri. Perbedaan itu terlihat dari segi penyaluran Dana BOS. Sekolah swasta menerima dana BOS adalah sebanyak 2 tahap dalam setahun. Yaitu penyaluran pertama di semester 1 sedangkan penyaluran kedua di semester 2. Akan tetapi, berbeda dengan penyaluran Dana BOS di Sekolah negeri, Sekolah negeri hanya diberikan 1 tahap penyaluran Dana BOS. Penyaluran tersebut diberikan setiap awal tahun. Maka dari itu pihak sekolah sangat memperhatikan penyusunan RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) agar nantinya tidak ada kekeliruan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara sekolah bahwasanya pencairan Dana BOS saat ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena bendahara sekolah sudah menjadi BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu). Oleh karena itu ketika pihak sekolah telah selesai menyusun RKA, maka untuk

pencairan Dana BOS, bendahara sekolah yang kedudukannya sebagai BPP mengajukan Surat Pembiayaan (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kemudian bendahara sekolah menerangkan kembali bahwasanya padaintinya tujuan adanya Dana BOS adalah untuk pembiayaan sarana dan prasarana sekolah, seperti pembelian perlengkapan buku-buku paket setiap pelajaran, pembiayaan untuk perlengkapan alat yang dapat mendukung proses belajar mengajar, seperti alat media pembelajaran, pembiayaan langganan listrik, kegiatan ekstrakurikuler dan pembiayaan untuk gaji honorer. Kemudian selain itu, tujuan utama dari program Dana BOS ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Dengan begitu Dana BOS hadir juga untuk memberikan keringanan beban masyarakat untuk dibebaskan pungutan dalam bentuk apapun kepada siswa miskin. Namun terkadang masih ada beberapa buku yang kurang, sehingga mungkin ada beberapa siswa tidak mendapatkan salah satu buku paketnya. Hal ini terjadi karena Tapel (Tahun Pelajaran) berbeda dengan tahun pemberian Dana BOS. Jadi, ketika ada siswa bertambah (siswa pindahan) di semester 2 mereka tidak mendapatkan salah satu buku paketnya.

4.2.2 Komponen-komponen Pembiayaan Dana BOS

1. Pengembangan perpustakaan, yaitu dengan adanya penyediaan buku-buku paket yang akan diserahkan kepada seluruh siswa yang ada di Sekolah.
2. Pengembangan bakat dan minat siswa melalui ekstrakurikuler dan berbagai macam perlombaan lainnya.

3. Pembiayaan kegiatan siswa, yaitu pembiayaan HUT Kemerdekaan Indonesia, PMR dan kegiatan lomba.
4. Kegiatan penerimaan siswa baru, seperti penyediaan formulir pendaftaran siswa baru dan berbagai macam biaya ATK/Foto Copy.
5. Pembiayaan proses belajar mengajar, yaitu dengan adanya perlengkapan alat tulis seperti spidol, penghapus papan tulis dan lain yang berkaitan.
6. Pembiayaan langganan Daya dan Jasa (Iuran Listrik dan Air)
7. Pemberian honorium bulanan untuk guru honor dan tenaga kependidikan honorer.

Berdasarkan penjelasan komponen-komponen yang tertulis diatas adalah data yang telah didapatkan oleh peneliti melalui wawancara dengan pengelola Dana BOS di Sekolah yaitu bendahara sekolah. Data diatas juga diperoleh dari bukti buku administrasi Dana BOS dan buku profil Sekolah yang menerangkan keikutsertaan siswa dalam kegiatan kegiatan perlombaan dan sebagainya.

Adapun hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pihak pengelola sekolah yaitu mengenai efektivitas pengelolaan Dana BOS adalah sebagai berikut :

1. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program adalah sejauh mana peserta program tepat dengan sarannya. (Jibril, 2019) Dalam penelitian ini ketetapan sasaran program ialah penentuan kepada siapa saja program Dana BOS ditujukan dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam Juknis

Dana BOS, telah tertera kegiatan apa saja yang telah ditetapkan dalam penggunaan Dana BOS untuk membuat program di sekolah. Menurut Subagyo efektivitas adalah kesesuaian antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam menganalisis untuk mengukur ketetapan sasaran Dana BOS terdapat 3 sasaran yaitu sasaran bagi sekolah, bagi guru dan bagi siswa/walimurid. Berikut penjelasan 3 sasaran dalam ketetapan program dana BOS:

a. Bagi Sekolah

Dalam program Dana BOS sekolah adalah lokasi utama pemerintah untuk dapat menyalurkan dana BOS. Syaratnya adalah untuk sekolah yang berada di perkotaan memiliki jumlah siswa melebihi 60 siswa dikecualikan untuk sekolah SDLB/SMPLB/SMALB. Kemudian sekolah juga memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agama serta data sekolah sudah terdaftar di data EMIS.

Dengan diberikannya dana BOS ke sekolah maka sekolah dapat terbantu dengan adanya pembebasan biaya melalui anggaran dana BOS dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah, seperti kegiatan HUT kemerdekaan, PMR, kegiatan perlombaan dan olahraga. Selain itu, adanya perlengkapan buku bacaan di sekolah, seperti buku paket, buku cerita dan lain sebagainya. Dengan begitu sekolah tidak harus melaksanakan pemungutan biaya kepada guru maupun wali murid.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari kepala sekolah:

“Dengan adanya dana BOS, sekolah dapat terbantu untuk melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan juga terbantu meringankan pembiayaan jasa listrik dan air. Sekolah juga akan memberikan buku paket untuk setiap siswa. Akan tetapi, mungkin ada sedikit kendala terkadang jumlah buku tidak cukup. Karena pemberian dana BOS diberikan satu kali di awal tahun, jadi jika ada siswa baru di semester 2. Maka ada kekurangan buku”

b. Bagi guru

Pelaksanaan proses belajar mengajar yang merupakan salah satu poin untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini juga menjadi komponen yang penting dalam sekolah. Profesi guru disekolah adalah orang yang sering bertatap muka dan berkomunikasi langsung dengan siswanya. Dengan begitu guru harus memiliki cara agar dalam pelaksanaan mengajar tidak membuat kesulitan baginya. Tidak hanya berbicara dengan tangan kosong, guru juga memerlukan media belajar agar anak mudah paham atas penjelasannya.

Dengan adanya anggaran Dana BOS tersebut dapat memberikan kemudahan bagi guru untuk pembelian bantuan media pembelajaran. Seperti proyektor dan hal lain yang diperlukan sesuai dengan mata pelajarannya. Kemudian tidak hanya itu penyediaan buku paket juga membantu melancarkan proses belajar. Jadi, guru tidak kesulitan untuk mencatat penjelasannya di papan tulis, karena siswa juga bisa menyimak dengan bukunya sendiri. Hal ini sangat membantu bagi guru. Selain itu, bagi guru atau tenaga pendidikan yang berstatus honor juga mendapatkan gaji honor

dari anggaran Dana BOS.

Hal ini didukung oleh penjelasan dari salah satu guru di SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo:

“Benar, biasanya nanti setiap rapat. Kami akan mengusulkan buku apa yang belum ada bagi masing-masing mata pelajaran yang dipegang oleh setiap guru. Hal ini mempermudah guru untuk tidak mengeluarkan biaya buku paket lagi”

Dan juga pernyataan dari Bendahara sekolah SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo:

“Tidak hanya untuk membeli barang-barang media pembelajaran, tetapi Dana BOS juga diberikan untuk guru dan tenaga kerja yang berstatus honor, karena tidak semua guru disini yang pegawai”

c. Bagi siswa

Dampak positif adanya anggaran Dana BOS bagi siswa yaitu juga sama menguntungkan dengan guru. Siswa terbantu dengan adanya buku paket yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Sehingga wali murid tidak terbebaskan dengan buku paket. Selain itu, siswa yang berstatus miskin juga diberikan bantuan beasiswa. Dengan demikian siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu juga bisa melanjutkan pendidikan. Hal ini sesuai dengan tujuan Dana BOS yaitu untuk mengurangi angka putus sekolah anak.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari pernyataan Kepala sekolah SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo:

“Seperti yang diketahui tujuan Dana BOS untuk mengurangi angka putus sekolah anak, dengan begitu siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu juga terbantu dengan pemberian beasiswa. Dan untuk

setiap siswa lainnya juga terbantu dengan tersedianya buku paket setiap mata pelajaran.”

Dari hasil wawancara di atas maka peneliti juga melakukan wawancara lanjutan untuk memperkuat pernyataan di atas dengan melakukan wawancara dengan 3 wali murid yang alamat rumahnya juga berdekatan dengan jarak menuju sekolah.

Hal tersebut senada dengan pernyataan dari salah satu wali murid yang berkenaan dengan pemberian buku paket sekolah.

“Untuk penyediaan buku paket di SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo itu sangat cepat diberikan. Anak saya saja disitu ada 2 yang sekolah disitu. Untuk yang baru daftar masuk sekolah disitu buku paketnya langsung diberikan ketika pada hari rapat orang tua murid. Menurut saya, ini sangat membantu apalagi jika kondisi seperti sekarang, karena wabah virus corona yang menetapkan sekolah masih diliburkan. Dengan begitu buku paket ini dapat membantu untuk anak belajar di rumah. Akan tetapi, jika ditanya jika pemberian buku selalu lengkap untuk semua mata pelajaran, maka jawabannya tidak. Karena ada anak saya yang baru tamat, dia dari kelas 1 sampai kelas 6 pernah tidak dapat buku. Sepertinya itu giliran untuk semua siswa ada salah satu buku paketnya tidak ada. Jika hari ini anak saya tidak mendapatkan buku ini besoknya giliran anak lainnya. Terkadang saya juga harus memfotocopi buku paket untuk anak saya. Dan juga diminta untuk uang pemeliharaan buku.”

Kemudian untuk memperkuat kembali pernyataan di atas, maka peneliti juga melakukan wawancara lanjutan lagi dengan wali murid lainnya mengenai pemberian beasiswa, maka pernyataan yang disampaikan adalah:

“ iya benar, saya berasal dari keluarga kurang mampu. Saya seorang IRT dan suami saya tukang

becak. Akan tetapi, walaupun begitu anak saya sering mendapatkan juara di sekolah, termasuk juara umum juga pernah. Untuk buku insya allah selalu ada dan juga terbantu dengan adanya beasiswa dari sekolah.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa ketetapan sasaran program dalam pengelolaan Dana BOS sudah dapat dikatakan tepat sasaran. Akan tetapi, terdapat satu penyebab utama dari buku paket yang diberikan tidak semuanya lengkap adalah karena penyusunan anggaran Dana BOS dilakukan di awal tahun untuk satu tahun anggaran yang terhitung dari januari sampai desember. Jadi, jika ada siswa baru yang masuk di semester 2 tidak mendapatkan salah satu bukunya. Sehingga wali murid harus fotocopy salah satu dari buku paket yang tidak didapatkan.

2. Sosialisasi program

Sosialisasi program adalah titik awal yang menentukan keberhasilan atau pencapaian sebuah program. Dengan begitu sosialisasi program harus dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Dalam hal sosialisasi sekolah mensosialisasikan peruntukan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) kepada ratusan wali murid. sehingga nantinya para orang tua dapat mengerti apa saja yang dibiayai dari dana BOS untuk sekolah. Kemudian sosialisasi selanjutnya ialah berkenaan dengan komite sekolah dan wali murid untuk sosialisasi pengusulan program atau kegiatan apa yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya. Sosialisasi ini berfungsi untuk melancarkan pelaksanaan kegiatan. SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo juga

membuat pertemuan wali murid untuk berdiskusi tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Sekolah. Sebelum adanya pertemuan dengan kepala sekolah, bendahara sekolah dan pihak dewan guru lainnya. Dengan lebih awalnya komite sekolah telah melakukan pertemuan pertamanya dengan pihak seluruh wali murid. Komite sekolah sebagai mitra kerja kepala sekolah dapat memberikan usulan-usulan program yang didapatkan oleh wali murid lainnya.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Bendahara Sekolah SDN WONOASIH 1

“Kalau untuk membuat program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekolah. Kami mempunyai komite sekolah yang merupakan perwakilan dari seluruh wali murid di Sekolah yang mana tugasnya ialah memberikan usulan-usulan untuk pelaksanaan program. Jika komite sekolah telah setuju dengan pelaksanaan program. Maka dengan begitu kami menganggap bahwa seluruh wali murid juga telah setuju”

Kemudian juga didukung dengan pernyataan komite sekolah SDN WONOASIH 1

“iya benar, tugas komite sekolah adalah sebagai perwakilan dari ratusan wal murid untuk dapat menyampaikan jika ada pengusulan atau keluhan walimurid kepada pihak sekolah”

Dari hasil wawancara di atas, harus pula untuk bertanya kepada wali murid agar dapat menguatkan pernyataan diatas. Hal ini juga sesuai apa yang disampaikan oleh wali murid SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo:

“ Iya benar, kami seluruh wali murid pernah dikumpulkan oleh pihak sekolah untuk rapat walimurid dan ada penjelasan Dana BOS. Adapun isi rapatnya adalah tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang anak kami lakukan di sekolah seperti

adanya ekstrakurikuler (ekskul), kegiatan ulangan harian, perawatan sekolah, pembelian perangkat komputer, dan lainnya.”

Dari hasil wawancara diatas mengenai sosialisasi program Dana BOS yang dilakukan SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo bahwasanya pihak sekolah sudah melakukan sosialisasi kepada wali murid terhadap item-item dalam penggunaan Dana BOS. Akan tetapi, menurut peneliti sosialisasi penggunaan Dana BOS di SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo belum terdapat sosialisasi penggunaan anggaran Dana BOS yang dicantumkan di spanduk atau papan yang bisa dilihat oleh walimurid. Ha ini tentu saja sosialisasi yang telah dilakukan oleh SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo belum cukup efektif.

3. Tujuan program

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh individu ataupun kelompok orang. Secara keseluruhan tujuan adalah hasil yang ingin diharapkan oleh setiap orang berdasarkan prinsip masing masing. Adapun tujuan dalam sebuah program adalah pedoman untuk dapat mengukur pencapaian efektivitas dan efisiensi. Dalam menentukan efektifnya suatu tujuan yaitu kita dapat melihat sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan atau direncanakan sebelumnya.

Dalam pengelolaan Dana BOS terdapat tujuan dari terbentuknya sebuah program sekolah. Tujuan adanya program Dana BOS dalam pengeluaran anggaran Dana BOS adalah meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu. Dengan pendidikan yang bermutu dapat meningkatkan mutu

pendidikan Indonesia.

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan harus terus menerus dilakukan baik secara konvensional maupun inovatif. Menurut para ahli pendidikan, dalam mengukur mutu pendidikan di sekolah terdapat 3 indikator yang bisa dilihat yaitu input, proses dan hasil.

- 1) Terdapatnya input untuk meningkatkan mutu pendidikan Sekolah. Input pendidikan dapat dinyatakan bermutu, jika sekolah mampu berproses dengan baik. Adapun cara untuk dapat mengukur input yaitu :
 - a. Tersedianya visi misi sekolah.
 - b. Tersedianya struktur organisasi (mencakup seluruh guru dan tenaga kerja lainnya).
 - c. Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang baik.

Adapun poin poin di atas dapat kita lihat dalam profil Sekolah. Dengan begitu Sekolah dapat memiliki etos kerja yang terukur.

- 2) Terdapatnya proses untuk meningkatkan mutu pendidikan Sekolah.

Dalam pengelolaan Dana BOS di SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo juga mengacu bagaimana suasana belajar yang baik. Sehingga siswa mudah memahami apa yang sedang guru dijelaskan. Kemudian siswa siswa SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo juga sering mengikuti lomba lomba dan acara HUT Kemerdekaan Indonesia.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari wali murid SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo

“Siswa siswi SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo sering mengikuti perlombaan. Seperti perlombaan antar Sekolah dan juga mengikuti perayaan 17 Agustus. Untuk penyewaan baju baju adat itu. Kami menyewa hanya di satu tempat yang sudah bekerja sama dengan pihak Sekolah. Bukan sepenuhnya bajunya gratis, akan tetapi jika nyewa di tempat itu ada pemotongan harga. Harga penyewaan baju adat ditempat yang sudah bekerja sama dengan pihak Sekolah berbeda dengan harga di tempat lain. Hal ini juga memudahkan para wali murid”

- 3) Terdapatnya hasil untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah. Hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang sudah didapatkan oleh siswa di SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo.

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Data Prestasi Siswa SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo

NO	Bidang Kegiatan	Tingkat Prestasi	Tingkat Kegiatan	Tahun
28	Rebana (Personi)	Juara I II	SD/MI Se-Kota Kota Probolinggo	2015
29	Pidato (Putra)	Juara I	SD/MI Se-Kota Kota Probolinggo	2016
30	Tenis Meja (Olahraga Gembira) a. Ganda (Putra) b. Tunggal (Putri)	Juara II dan Juara I	SD/MI Se-Kota Kota Probolinggo	2016
31	Persami	Juara I,	SD/MI Se-Kota	2021

	<ul style="list-style-type: none"> a. Lomba Kompas (Putra) b. Lomba Menafsir (Putri) c. Lomba Membuat Tandu (Putri) 	Juara II, Juara III dan Juara IV	Kota Probolinggo	
32	KSM Kompetensi Sains Matematika terintegrasi	Juara 1 dan Juara II	MI Se-Kota Kota Probolinggo	2023

Sumber: SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo

Berdasarkan rekapitulasi data prestasi siswa dari tahun 2015 sampai dengan 2023 terdapat peningkatan prestasi siswa dari tahun 2016. Adapun program Dana BOS dimulai pada tahun 2015. Maka dari itu, prestasi siswa terus meningkat ketika anggaran Dana BOS mendukung segala kegiatan, seperti adanya perlengkapan rebana untuk mengikuti lomba dan perlengkapan alat olahraga. Hal ini dapat mendukung siswa dari proses latihan hingga mengikuti lomba hingga mengambil kejuaraan.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari kepala sekolah SDN WONOASIH 1

“Dalam meningkatkan mutu pendidikan disini, ialah salah satu kegiatan yang kami laksanakan ialah ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setiap semester setelah pelaksanaan ujian selesai, selain itu juga keikutsertaan siswa SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo dalam ajang perlombaan-perlombaan antar sekolah. Dengan adanya kegiatan ini juga dapat melatih kemampuan dan mental keberanian siswa didepan khalayak ramai. Kemudian ekstrakurikuler saat ini yang unggul di MIN3 Kota Probolinggo adalah bidang olahraga”

Berdasarkan tabel di atas bahwasanya dapat kita lihat tujuan yang diharapkan oleh SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo dapat dikatakan efektif. Karena ada peningkatan dari prestasi siswa SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo. Adapun Peran Dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan Sekolah di bidang program ekstrakurikuler sedikit demi sedikit meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel di atas yaitu adanya peningkatan prestasi siswa dari tahun ke tahun. .

4. Pemantauan program

Pemantauan program ialah kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pemantauan atau pengawasan program Dana BOS di SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo terdapat 2 yaitu pengontrolan internal dan eksternal. Berikut adalah penjelasannya:

1. Pengawasan internal, ialah pemantauan yang dilakukan dalam lingkup Sekolah. Dalam pengelola Sekolah yang paling tinggi adalah kepala sekolah. kepala sekolah yang akan mengontrol apakah program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah atau tidak. Jika terdapat program yang tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan ada revisi RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) untuk tahun ajaran berikutnya.
2. Pengawasan eksternal, ialah pengontrolan yang dilakukan dari luar lingkup sekolah. pengontrolan eksternal dilaksanakan oleh tim audit dari Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) kota Kota

Probolinggo dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melihat kesesuaian program terhadap kebutuhan dan sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari bendahara sekolah SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo:

“Untuk pengawasan maupun pemantauan program, pihak sekolah awalnya akan membuat pertemuan untuk menyusun RKA. Setiap guru juga akan dikumpulkan untuk pengadaan buku paket baru, kemudian untuk pembelian alat media pembelajaran apa saja yang diperlukan. Kemudian setiap akhir ajaran, bendahara sekolah juga membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pengeluaran pembiayaan Dana BOS.”

Kemudian diperkuat dengan pernyataan dari kepala sekolah yang mengatakan:

“Iya benar, untuk pemantauan program biasanya nanti juga akan diadakan rapat seluruh tenaga kerja terhadap program atau kegiatan yang telah dilaksanakan”

Pengawasan pengelolaan Dana BOS yang dilakukan oleh pihak tim SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo ialah dengan melihat data rencana kegiatan dan anggaran (RKA) yang telah disusun sebelumnya dengan membandingkan laporan hasil penggunaan anggaran Sekolah.

Dari hasil wawancara di atas bahwa pemantauan setelah program yang dilakukan oleh SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo untuk mengevaluasi hasil

kinerja organisasi Sekolah selama SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo mengelola Dana BOS. Berdasarkan pernyataan tersebut pengawasan yang dilakukan oleh SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo cukup efektif, karena pemantauan setelah program terlaksana di SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo.

Setelah peneliti menganalisis tentang efektivitas program Dana BOS Terhadap mutu pendidikan di SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo berdasarkan 4 indikator yaitu ketetapan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program dengan cara melakukan penelitian secara observasi dan wawancara dengan pihak sekolah SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo yaitu kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah dan juga melibatkan orang tua dari wali murid SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo untuk memperkuat data penelitian. Maka, efektivitas pengelolaan Dana BOS terhadap peningkatan mutu pendidikan di SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo dapat dikatakan sudah cukup efektif. Dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo, pihak Sekolah dianggap telah mencapai target. Karena peneliti telah melihat prestasi prestasi yang didapatkan oleh siswa SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo cukup banyak. Walaupun bendahara sekolah mengatakan masih ada juga yang berada di atas prestasi SDN WONOASIH 1 Kota Probolinggo. Namun, pihak Sekolah tidak pernah berhenti untuk menaikkan prestasi anak dari tahun ke tahun. program Dana BOS akan lebih dimanfaatkan secara selektif dan produktif untuk dapat melebihi target yang telah tercapai.

C. ANALISIS DAN INTERPRESTASI DATA

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Probolinggo merupakan suatu Organisasi Pemerintahan yang bergerak di Bidang Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Pendidikan dan Pengajaran Tingkat Dasar, Menengah, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Formal dan Non Formal, Kepemudaan dan Olahraga, Pendidikan merupakan hal sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan bagi suatu Negara. Pendidikan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan akses Pendidikan, dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing.

Disamping itu memiliki budi pekerti luhur dan moral yang baik, peningkatan akses dan mutu pendidikan kepada masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang dapat membangun dan memajukan Bangsa dan Negara agar tercapai masyarakat yang berilmu, cerdas dan berkerakter. Pendidikan merupakan investasi besar dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu indikator penuntasan Program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD & SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajib belajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi *Education For All* (EFA) di Dakar (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 76 Tahun 2012).

Program Bantuan Operasional Sekolah yang bertujuan khusus untuk membebaskan pungutan meringankan beban masyarakat dan BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada peserta didik miskin yang putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis dan biaya lainnya. Program BOS yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009.

Pemerintah telah melakukan perubahan tujuan pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Dana BOS mengalami perubahan mekanisme penyaluran dari transfer ke Kabupaten/Kota pada tahun 2011 menjadi transfer ke Provinsi selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara online pada tahun 2012. Dana BOS dari rekening Satker Provinsi di lembaga penyaluran yang ditunjuk dikirimkan ke rekening sekolah penerima BOS sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Dinas Provinsi dengan lembaga penyalur tersebut. (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012).

Dana BOS adalah program pemerintahan yang berasal dari realokasi dana subsidi BBM dibidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan siswa lain, dan dana BOS ini dikelola langsung oleh Sekolah karena dana BOS ini ditransfer dari Dinas Pendidikan Provinsi ke Sekolah secara online. Dengan BOS siswa diharapkan dapat memperoleh pendidikan yang bermutu sampai 9 (Sembilan) tahun. Sasaran program

ini adalah seluruh siswa SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta diseluruh Provinsi Indonesia.

Alur pengelolaan Dana BOS terdiri dari 3 tahap yang nantinya akan bermuara pada satu output yang berupa dampak implementasi pengelolaan dana BOS. Ketiga dampak tersebut antara lain :

1. Perencanaan

- 1) Melakukan evaluasi dari sekolah, dengan cara mengisi instrument evaluasi diri terhadap pencapaian 8 SNP dilanjutkan dengan membuat rekomendasi dan rencana tindak lanjut.
- 2) Mengisi dan mengirimkan data pokok pendidikan (BOS-01A, BOS 01B dan BOS-01C) secara lengkap dan akurat yang kemudian dikirimkan secara online.
- 3) Membentuk Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah.
- 4) Melakukan sosialisasi Juknis BOS kepada warga sekolah dan mengumumkan berapa jumlah dana BOS
- 5) Kepala sekolah bersama guru, komite, dan tim manajemen BOS menyusun draft RKAS.
- 6) Mengadakan rapat finalisasi RKAS yang diketahui oleh perwakilan orang tua siswa.

- 7) Mengirimkan laporan final RKAS untuk disahkan oleh Unit Pengelola Pendidikan (UPP) setempat.

2. Pelaksanaan

- 1) Bendahara mengambil dana BOS yang telah disalurkan ke rekening masing-masing sekolah oleh pemerintah pusat.
- 2) Dana BOS dicairkan sesuai kebutuhan sekolah dan tidak boleh diambil langsung seluruhnya.
- 3) Penggunaan dana BOS mengacu pada 13 komponen yang terdapat dalam Juknis BOS yang berlaku dan didasarkan pada kesepakatan Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite.
- 4) Pembelian barang dan jasa dilaksanakan sesuai Juknis BOS dan dicatat dalam formulir inventaris barang.

3. Pelaporan

- 1) Menyusun Buku Kas Umum (BOS-K3), Buku Pembantu Kas (BOSK4), Buku Pembantu Bank (BOS-K5), dan Buku Pembantu Pajak (BOS-K6).
- 2) Menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana (BOS-K7) dan Rekapitulasi Penggunaan Tiap Sumber Dana (BOSK7a).
- 3) Menyerahkan laporan BOS Triwulan ke UPP Kecamatan dan Dinas

Pendidikan Kabupaten.

- 4) Sekolah mengirimkam laporan penggunaan dana BOS secara online melalui website Kemendikbud (laporan BOS online).
- 5) Sekolah mempunyai bukti pengeluaran dana (SPJ) yang sah dan akurat, dan juga mempunyai bukti setoran pajak.
- 6) Sekolah melaporkan penggunaan dana BOS kepada masyarakat melalui papan informasi dan surat edaran yang diberikan kepada orang tua siswa.

Dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Program Dana BOS dapat membantu dan mendorong masyarakat agar bisa mendapatkan pendidikan minimal di jenjang SMA. Selain itu, pemerintah juga ingin mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea ke-4 yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Harapan terbesar dengan adanya program Dana BOS dapat meningkatkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas, serta program tersebut dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah tertulis pada petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS). (Juknis BOS, 2019)

Berdasarkan petunjuk teknis (Juknis), pengelolaan Dana BOS juga melibatkan beberapa tim yang saling bekerja sama, antara lain tim pusat, tim provinsi, tim kabupaten/kota, sekolah, lembaga keuangan dan instansi terkait lainnya. Dengan adanya petunjuk teknis tersebut, maka dengan mudahnya sekolah menjadikannya sebagai tumpuan proses pelaksanaan program Dana BOS, agar nantinya sekolah tidak keluar dari penyimpangan dan ketentuan lainnya, agar pengelolaan Dana BOS dapat dikatakan efektif. (Farida, 2017)

Untuk mengukur efektivitas dalam penyediaan pengelolaan Dana BOS dapat dilihat dari kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana penggunaan Dana BOS, kesesuaian jumlah Dana BOS dengan jumlah siswa dalam SD, dan keseimbangan antara sasaran, program dan tujuan (puntong). Dengan demikian, jika ketiga indikator ini dapat dijalankan dengan baik, maka sudah semestinya menjadi salah satunya yang dapat mendukung program Dana BOS